Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital

(Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law: Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy)

Zainal Arifin⁽¹⁾

Faculty of Law, Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.

E-mail: zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

Zico Junius Fernando⁽²⁾

Faculty of Law, Universitas Bengkulu

Jl. WR Supratman, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia.

E-mail: zjfernando@unib.ac.id

Emi Puasa Handayani⁽³⁾

Faculty of Law, Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.

E-mail: mipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi yuridis dari perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap partisipasi masyarakat dalam ruang siber, khususnya dalam konteks pemilihan umum (PEMILU). Dalam perkembangannya, UU ITE sering dianggap multitafsir dan represif, yang berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Pasal-pasal seperti Pasal 27A dan Pasal 27B, meskipun dirancang untuk menggantikan pasal-pasal sebelumnya yang dianggap "pasal karet," tetap menuai kritik karena masih menciptakan efek jera (chilling effect). Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan pengurangan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi digital. Namun, kajian mengenai dampak perubahan kedua UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dalam pemilu 2024 serta perbandingan regulasi internasional yang lebih proporsional masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implikasi perubahan UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Temuan menunjukkan bahwa regulasi yang tidak jelas dalam UU ITE dapat memicu ketidakpastian hukum, memarjinalkan kelompok tertentu, dan menciptakan

ketidaksetaraan dalam akses informasi. Reformasi UU ITE diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, melindungi kebebasan berpendapat, dan mendorong partisipasi masyarakat secara inklusif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap pasal-pasal hasil revisi dalam UU No. 1 Tahun 2024 dan bagaimana perubahan tersebut berdampak pada kebebasan berekspresi dalam pemilu 2024, dengan pendekatan perbandingan global untuk mengusulkan regulasi ruang siber yang lebih adil dan demokratis. Studi ini merekomendasikan pendekatan berbasis prinsip demokrasi, peningkatan literasi digital, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan regulasi ruang siber yang adil dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kata Kunci: UU ITE, demokrasi, pemilu, partisipasi masyarakat, ruang siber.

ABSTRACT

This study examines the legal implications of the second amendment to the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) through Law No. 1 of 2024 on public participation in cyberspace, particularly in the context of general elections (PEMILU). Over time, the UU ITE has often been regarded as ambiguous and repressive, potentially hindering freedom of expression. Provisions such as Articles 27A and 27B, while intended to replace previously criticized "rubber articles," continue to face criticism for perpetuating a chilling effect. This situation raises concerns about the declining quality of public participation in digital democracy processes. However, studies on the impact of the second amendment to the UU ITE on freedom of expression in the 2024 elections, as well as comparative analyses of more proportional international regulations, remain limited, necessitating further research. This study employs a descriptive qualitative approach to analyze the implications of the amendments to the UU ITE on freedom of expression and public participation in elections. The findings reveal that the unclear regulations in the UU ITE may lead to legal uncertainty, marginalize certain groups, and create inequality in access to information. Reforming the UU ITE is essential to ensure that the regulations align with democratic principles, protect freedom of expression, and promote inclusive public participation. The novelty of this study lies in its specific analysis of the revised provisions in Law No. 1 of 2024 and their impact on freedom of expression in the 2024 elections, incorporating a global comparative approach to propose a more just and democratic cyberspace regulation. This study recommends a democracy-based approach, improved digital literacy, and the involvement of various stakeholders to develop fair and responsive cyberspace regulations in response to social dynamics.

Keywords: ITE Law, democracy, elections, public participation, cyberspace.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah paradigma dalam tata kelola demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum (PEMILU), termasuk penggunaan media sosial untuk kampanye (Khairul Fahmi, 2021). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah paradigma dalam tata kelola demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum (Fauziah et al., 2023).

Penggunaan teknologi digital dalam pemilu dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Teknologi digital memungkinkan otomatisasi, pengumpulan, dan pemrosesan data secara cepat, serta meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, serta memberikan inovasi dan fleksibilitas dalam metode pemilihan (Khairunnisa, Arbaiyah, Sulung Tangguh Yurizon, 2024).

Ruang siber menjadi arena penting bagi partisipasi masyarakat, di mana berbagai pendapat dan informasi dapat disampaikan dengan cepat dan luas. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan perundangan yang berlaku (Budhijanto, 2024). Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai regulasi utama dalam pengelolaan ruang siber masih menimbulkan berbagai tantangan hukum yang signifikan.

Salah satu isu utama yang mencuat adalah adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum dan investigasi, media sosial kini telah menjadi alat yang digunakan secara luas dalam proses penyelidikan, baik dalam kasus perdata maupun pidana (Joenaidy Efendi, 2023). Di tengah cepatnya perkembangan teknologi, UU ITE sering kali tidak mampu mengakomodasi situasi dan kondisi baru yang muncul, sehingga menciptakan ruang abu-abu di mana tindakan tertentu dapat dipertanyakan secara hukum. Meskipun ada azas yang berlaku dalam hukum pidana

seseorang tidak dapat di pidana apabila tindak pidana itu belum di rumuskan dalam Undang-undang (Yurizal, 2018). Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terkait dengan batasan kebebasan berpendapat dan potensi sanksi yang dapat diterima jika mereka menyampaikan kritik atau pandangan mereka secara terbuka.

Selain itu, kekaburan makna dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga menjadi permasalahan yang serius. Istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang sering kali tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga memberikan peluang untuk interpretasi yang berbeda oleh aparat penegak hukum (Simamora et al., 2023). Ketidaktepatan ini berpotensi disalah gunakan, terutama dalam konteks politik, dimana kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik dapat dianggap sebagai tindak pidana (Tan, 2022). Dalam banyak kasus, ketidakpastian ini membuat individu ragu untuk menyuarakan pendapat mereka, sehingga menghambat partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Lebih jauh lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimulai dengan fokus pada Pasal 27 hingga Pasal 29 yang dinilai memiliki rumusan yang multitafsir (karet) dan berpotensi tumpang tindih dengan aturan hukum lainnya. Konflik norma antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjadi tantangan (Nyoman Gede Antaguna

& Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2023). Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan menyampaikan informasi, di sisi lain, UU ITE sering kali digunakan untuk menindak individu yang dianggap melanggar norma-norma tertentu dalam konteks kebebasan berpendapat. Misalnya, ketika seseorang mengungkapkan kritik yang tajam terhadap kebijakan publik, mereka dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE meskipun kritik tersebut merupakan bagian dari hak mereka untuk berpendapat (Budiman et al., 2021).

Konflik ini menciptakan ketidakselarasan antara norma hukum dan nilai-nilai demokrasi, sehingga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana UU ITE dapat diimplementasikan tanpa merugikan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Dengan mempertimbangkan isu-isu hukum ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi UU ITE terutama perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap pemilu dan partisipasi masyarakat di ruang siber, serta mencari solusi untuk meningkatkan keberlanjutan demokrasi digital di Indonesia (Budiman et al., 2021).

Beberapa peneliti telah melakukan riset dengan tema Pemilu dan Undang Undang ITE antara lain Andi Wijaya, judul penelitiannya “Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat dan Berpolitik Selama Masa Kampanye Pemilu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE di Indonesia dapat memberikan dampak terhadap kebebasan berpendapat dan berpolitik selama masa kampanye pemilu. Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk membatasi kritik dan pandangan yang berbeda terhadap calon atau partai politik. Penelitian kedua tentang tema yang sama di lakukan (Syahri, 2010). Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Ngazis dari Unissula berjudul

“Tantangan Hukum Terkait Regulasi Kampanye Di Media Sosial Dalam Pemilu 2024” (Ngazis et al., 2024). Penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang terkait dengan regulasi kampanye di media sosial dalam konteks pemilu 2024. Penelitian ini mempertimbangkan tantangan-tantangan seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), upaya menjatuhkan lawan politik melalui konten yang merugikan, dan ketidakjelasan regulasi terkait kampanye di media sosial. Sumber hukum yang digunakan UU ITE yang lama, yaitu Nomor 11 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Penelitian ketiga dilakukan oleh Anggita Nur Fadilla dari Universitas Negeri Surabaya berjudul “Dinamika Perubahan Sosial dan Politik di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Partisipasi Masyarakat” (Nur Fadilla et al., 2024). Penelitian ini menjelajahi bagaimana media sosial dan partisipasi masyarakat mempengaruhi perubahan sosial dan politik di era digital. Hasilnya bahwa kebebasan berpendapat di media sosial juga telah diatur dalam Undang-Undang ITE, sehingga harus tetap memperhatikan etika yang baik agar proses demokrasi berjalan baik.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui UU No. 1 Tahun 2024, yang merupakan revisi terkini dari regulasi ruang siber di Indonesia. Artikel ini mengkaji implikasi perubahan tersebut dalam konteks Pemilu 2024, menjadikannya relevan secara akademis maupun praktis. Salah satu kontribusi utama adalah analisis mendalam terhadap pasal-pasal baru, seperti Pasal 27A dan 27B, yang meskipun dirancang untuk menggantikan pasal multitafsir sebelumnya, tetap menuai kritik karena memunculkan tantangan hukum baru. Dengan menggunakan data terbaru dari periode Pemilu 2024, artikel ini memperlihatkan bagaimana regulasi siber dapat memengaruhi kebebasan

berpendapat, partisipasi masyarakat, dan kualitas demokrasi digital. Selain itu, tulisan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan regulasi siber, menekankan pentingnya literasi digital, dan memberikan rekomendasi reformasi berbasis prinsip inklusivitas. Artikel ini juga menonjolkan perbandingan dengan praktik internasional, seperti di Jerman, Kanada, dan Norwegia, yang menunjukkan bagaimana negara-negara tersebut berhasil menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan penegakan hukum di ruang digital. Dengan pendekatan ini, tulisan ini tidak hanya menyajikan analisis yuridis yang tajam tetapi juga menawarkan perspektif praktis dan strategis untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika teknologi serta kebutuhan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali dan memahami implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pemilu dan partisipasi masyarakat di ruang siber (Naibaho et al., 2024). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang lebih mendalam dan kompleks terkait dengan regulasi siber dan dampaknya pada demokrasi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis norma hukum, kebijakan publik, dan dinamika sosial dalam konteks ruang siber dan pemilu (Utin Indah Permata Sari, 2022). Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28E

yang menjamin kebebasan berpendapat, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan-peraturan dan kebijakan terkait pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait lainnya.

Langkah-langkah Penelitian, dengan membaca literatur, mengumpulkan dan menganalisis literatur hukum terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, dan dinamika pemilu di Indonesia. Pada tahap ini, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga terkait akan dikaji untuk memahami konteks regulasi yang berlaku. Peneliti juga akan menganalisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan partisipasi dalam pemilu, serta mengidentifikasi norma-norma dalam UU Dasar NRI Tahun 1945 dan UU Hak Asasi Manusia yang berpotensi berkonflik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam analisis ini, pola penerapan hukum yang dapat menimbulkan konflik norma atau kekosongan hukum akan diidentifikasi (Disemadi, 2022). Akhirnya, laporan penelitian disusun mencakup temuan-temuan mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pemilu dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi untuk reformasi regulasi yang lebih mendukung kebebasan berekspresi dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi akan menjadi bagian penting dari hasil penelitian ini. Langkah-langkah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mempengaruhi pemilu dan partisipasi masyarakat di ruang siber

serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan ke depan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Hubungan antara Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Penggunaan Regulasi Siber dalam Konteks Kebebasan Berpendapat.

Dalam era digital saat ini, ruang siber telah menjadi arena penting bagi partisipasi masyarakat dan ekspresi pendapat (Munawaroh & Suseno, 2024). Prinsip-prinsip demokrasi, yang mengedepankan kebebasan berpendapat dan partisipasi aktif, berhadapan dengan regulasi siber yang sering kali dianggap menghambat hak-hak tersebut. Periode Januari hingga Juni 2024, teridentifikasi 12 kasus yang melibatkan kriminalisasi terkait pemilu. Dua di antaranya berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik, lima terkait penyebaran berita bohong, dua melibatkan penyebaran informasi pribadi, dan tiga kasus didasarkan pada pasal ujaran kebencian, yang di jerat dengan pasal 27 UU ITE.

Pasal kriminal dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008, Undang-Undang 19 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) digunakan juga dalam pemilu 2024 terhadap tokoh sipil berpengaruh yaitu Roy Suryo atas komentarnya tentang Gibran yang menggunakan tiga mikrofon saat debat, dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan SARA. Anies Baswedan juga dilaporkan karena menyebutkan anggaran 700 triliun dalam debat capres, yang dianggap sebagai berita bohong. Tom Lembong dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik setelah ia mengunggah pendapat di akun Instagram pribadinya mengenai hak presiden untuk melakukan kampanye. Hasto Kristiyanto juga

dilaporkan atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Connie Bakrie juga dilaporkan sebagai salah satu aktor terlapor, dengan tiga laporan tuduhan penyebaran berita bohong dan SARA. Komentar Connie di media sosial tentang polisi yang memiliki akses ke Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) menjadi salah satu alasan yang mendorong pelaporan tersebut ke pihak Kepolisian.

Prinsip demokrasi menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk menyampaikan pendapatnya serta berpartisipasi secara aktif dalam diskusi publik tanpa rasa takut akan pembalasan, intimidasi, atau penganiayaan.(Andersen & Andersen, 2022) Kebebasan berpendapat tidak hanya menjadi hak individu tetapi juga merupakan elemen krusial dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis. Dengan adanya kebebasan ini, masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan ide, kritik, dan aspirasi mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan akuntabel.(Heinze, 2016) Dalam demokrasi yang ideal, kebebasan berpendapat memungkinkan warga negara untuk menjadi bagian integral dari mekanisme pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa kepentingan publik senantiasa menjadi prioritas utama. Dengan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat tidak hanya merasa memiliki kepentingan atas hasilnya, tetapi juga menjadi lebih percaya pada sistem demokrasi itu sendiri.(Xiang, 2024)

Dalam konteks Indonesia, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara tegas mengakui hak setiap orang untuk memiliki keyakinan, menyampaikan pendapat, dan menyebarluaskan informasi. Pengakuan konstitusional ini

mencerminkan komitmen negara untuk menjamin bahwa hak berpendapat dilindungi dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak ini bukan hanya sekadar jaminan formal, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang kritis dan partisipatif. Kebebasan berpendapat memberikan ruang bagi berbagai perspektif untuk berkembang, termasuk yang mungkin bertentangan dengan pandangan arus utama atau kebijakan pemerintah. (Putra et al., 2024) Dengan begitu, kebebasan ini tidak hanya mendorong pluralitas ide tetapi juga menjadi mekanisme penting untuk memperbaiki kesalahan, menyelesaikan konflik, dan menciptakan solusi inovatif untuk tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan berpendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Dalam sistem demokrasi yang matang, kebebasan ini sering kali diimbangi dengan regulasi tertentu yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan, seperti penyebaran ujaran kebencian, hoaks, atau pencemaran nama baik (Fatimah et al., 2024).

Oleh karena itu, meskipun hak ini bersifat fundamental, implementasinya memerlukan keseimbangan yang cermat antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Pada akhirnya, keberadaan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 merupakan jaminan konstitusional yang sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat terus terlibat dalam proses demokrasi. Tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi akan kehilangan esensinya sebagai sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat. Oleh karena itu, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak ini harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan praktik hukum di Indonesia. (Isdyanto et al., 2021)

Namun, di sisi lain, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali digunakan sebagai alat untuk mengekang kebebasan berpendapat. Misalnya, Pasal 27 yang mengatur tentang pencemaran nama baik dapat dipakai untuk menuntut individu yang mengkritik pemerintah atau pejabat publik. Kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009 menjadi contoh konkret di mana kritik terhadap layanan rumah sakit justru berujung pada tuntutan hukum. (Rachmawati et al., 2021) Meskipun tujuannya untuk melindungi reputasi, penerapan pasal ini sering kali disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. (Fernando et al., 2022)

Selain itu, Pasal 28 UU ITE, yang mengatur tentang penyebaran informasi yang menyesatkan dan dapat menimbulkan kebencian, juga menjadi sorotan. Ketidakjelasan definisi “informasi menyesatkan” menciptakan kekhawatiran di kalangan pengguna media sosial, yang cenderung takut untuk menyampaikan pendapat karena risiko dituntut secara hukum. Misalnya, kasus Buni Yani yang mengedit video pidato Ahok menjadi alat untuk menindak orang yang dianggap menyebarkan kebencian. (Bukhroni & Aisyah, 2020) Situasi ini mencerminkan adanya ketegangan antara regulasi dan kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi digital.

Kekaburan makna dalam UU ITE menjadi masalah lain yang mengganggu hubungan antara prinsip-prinsip demokrasi dan penggunaan regulasi siber. Istilah-istilah dalam undang-undang sering kali tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga memungkinkan interpretasi yang luas. Hal ini memicu penegakan hukum yang tidak konsisten, di mana pihak berwenang dapat menggunakan regulasi untuk menindak kritik yang tidak diinginkan, padahal seharusnya kritik tersebut merupakan bagian dari

kebebasan berpendapat. Misalnya, dalam kasus Ahmad Dhani, di mana kritiknya terhadap kelompok tertentu berujung pada penahanan, menunjukkan bagaimana hukum dapat dipakai untuk mengekang suara yang berbeda.(Fitriani et al., 2023)

Selain aspek hukum, ada juga dimensi sosial yang mempengaruhi hubungan antara regulasi siber dan prinsip demokrasi. Masyarakat yang merasa terancam oleh penerapan UU ITE cenderung menghindari partisipasi aktif dalam diskusi publik, sehingga mengurangi kualitas demokrasi. Riset menunjukkan bahwa masyarakat yang mengalami intimidasi atau penganiayaan hukum cenderung tidak bersuara dalam konteks politik, mengakibatkan hilangnya pluralitas pendapat yang seharusnya menjadi kekuatan dalam demokrasi (Andi Fadilah, 2021). Dalam hal ini, UU ITE berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang merugikan kesehatan demokrasi.

Dari perspektif internasional, praktik terbaik di negara lain menunjukkan bagaimana regulasi siber dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat. Negara-negara seperti Kanada dan Swedia menerapkan regulasi yang jelas dan transparan yang melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, sambil tetap menindak tindakan pidana di ruang siber. Perbandingan ini menunjukkan bahwa mungkin untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berpendapat, yang belum sepenuhnya terwujud dalam konteks UU ITE di Indonesia (Firmansyah, 2023).

Kritik terhadap UU ITE juga datang dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Para ahli berargumen bahwa undang-undang tersebut perlu direvisi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Reformasi yang dimaksud mencakup penghapusan

pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta penegasan kembali komitmen terhadap kebebasan berpendapat (Mandarlangi et al., 2024). Upaya ini penting agar regulasi siber dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung, bukan menghambat, partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Beberapa teori pemilu menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah elemen kunci dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pemilihan umum yang demokratis. (Laniuk, 2019) Kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka terhadap berbagai isu, calon pemimpin, serta arah kebijakan yang diusulkan, sehingga menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan terbuka. Salah satu teori yang relevan adalah teori partisipasi masyarakat, yang menekankan bahwa suara publik memiliki peran vital dalam menentukan masa depan politik suatu negara ((Nursetiawan & Ardhanariswari, 2022). Teori ini menganggap bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi politik, debat kebijakan, dan dukungan terhadap calon tertentu adalah indikator penting dari demokrasi yang sehat. Dengan adanya kebebasan berpendapat, individu merasa memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi dan keyakinannya tanpa tekanan atau rasa takut, baik secara langsung maupun melalui media sosial atau forum publik. Kebebasan berpendapat juga memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan yang dinamis, yang menjadi fondasi dari pengambilan keputusan yang bijaksana. Dalam pemilu, kebebasan ini memungkinkan pemilih untuk mengevaluasi calon berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak mereka. Selain itu, melalui kritik yang konstruktif, masyarakat dapat mendorong calon pemimpin untuk memperbaiki program kerja dan kebijakan mereka, sehingga lebih selaras dengan kebutuhan dan aspirasi publik (Gustrinanda & Tanjung, 2023). Dalam konteks ini, regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat bisa mengganggu legitimasi pemilu.

Penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap calon pemimpin atau partai politik dapat menimbulkan ketidakadilan serius dalam proses pemilihan umum. Kritik, yang sejatinya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan hak dasar dalam sistem demokrasi, menjadi terancam ketika UU ITE digunakan secara tidak proporsional atau diskriminatif. Dalam konteks pemilu, kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat, di mana masyarakat enggan menyuarakan pendapat mereka karena khawatir akan dijerat hukum (Armiwulan et al., 2024). Ketidakadilan ini dapat terlihat ketika penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE dilakukan secara tidak konsisten. Misalnya, kritik terhadap pemerintah atau calon tertentu sering kali direspon dengan langkah hukum yang cepat, sementara pelanggaran serupa yang dilakukan oleh pihak lain tidak mendapatkan perhatian yang sama. Ketidakadilan semacam ini memberikan sinyal buruk kepada masyarakat bahwa hukum tidak diterapkan secara merata, melainkan cenderung digunakan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu (Suhariyanto et al., 2024). Akibatnya, para pemilih dapat merasa terintimidasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu, baik melalui dukungan terhadap calon tertentu maupun dengan mengkritik kebijakan yang tidak mereka setujui. Dampak yang lebih luas dari penggunaan UU ITE untuk membungkam kritik adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Ketika pemilih merasa bahwa hak mereka untuk berbicara atau mengkritik telah dilanggar, mereka cenderung melihat proses pemilu sebagai sesuatu yang tidak adil dan kurang transparan (Zuhdi et al., 2025). Kondisi ini dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih, melemahkan legitimasi hasil pemilu, dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Hal ini bukan sekadar teori, tetapi telah terjadi dalam beberapa pemilihan

umum di Indonesia. Dalam beberapa kasus, kritik terhadap pemerintah atau calon tertentu di media sosial direspons dengan laporan hukum yang mengacu pada UU ITE. Tindakan ini tidak hanya membungkam individu-individu yang bersuara, tetapi juga menciptakan efek jera di kalangan masyarakat luas (Ahsan et al., 2023). Orang-orang menjadi lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pandangan politik mereka, bahkan ketika kritik yang disampaikan sebenarnya memiliki dasar yang valid dan bertujuan konstruktif. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses yang dirasa tidak adil ini sering kali berujung pada meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemerintah. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini dapat memperburuk krisis legitimasi politik, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas demokrasi. Pemilu, yang seharusnya menjadi momen untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat, malah berubah menjadi sumber frustrasi dan apatisme publik (Rohmah, 2023).

Pendapat para ahli tata negara juga menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan. Menurut Moh. Mahfud MD, kehadiran kritik konstruktif adalah esensial dalam proses demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan umum yang sehat. Tanpa kritik yang terbuka, pemerintah cenderung tidak dapat diawasi dan akuntabilitas publik dapat menurun (Choiriyati & Windarsih, 2019). Dalam hal ini, UU ITE yang mengekang kebebasan berpendapat dapat berfungsi sebagai penghalang bagi masyarakat untuk menjalankan perannya sebagai pengawas demokrasi.

Tantangan yang dihadapi oleh UU ITE dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan regulasi di era demokrasi digital menunjukkan perlunya reformasi yang mendalam. Kebebasan berpendapat merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi, termasuk di ruang

digital, di mana masyarakat semakin bergantung pada teknologi untuk menyuarkan pandangan, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Sayangnya, penerapan UU ITE di Indonesia sering kali menuai kritik karena dianggap multitafsir (karet) dan cenderung digunakan untuk menekan suara yang beragam, terutama kritik terhadap pemerintah atau pihak tertentu. Pengalaman dari beberapa negara dapat menjadi referensi dalam melakukan reformasi UU ITE. Negara-negara yang berhasil menghadapi tantangan serupa umumnya mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif terhadap kebebasan berpendapat. Pendekatan ini mengutamakan perlindungan hak-hak individu untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa rasa takut akan intimidasi atau tindakan hukum yang tidak adil. Regulasi dalam negara-negara ini dirancang untuk membatasi penyebaran informasi yang benar-benar merugikan, seperti ujaran kebencian atau ancaman kekerasan, tanpa menghambat diskusi kritis atau pandangan yang berbeda. Reformasi UU ITE yang lebih berpihak pada prinsip-prinsip demokrasi dapat membawa dampak positif yang signifikan. Pertama, regulasi yang jelas dan tidak multitafsir akan mengurangi potensi penyalahgunaan hukum untuk kepentingan tertentu. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi. Kedua, ruang siber yang lebih terbuka akan mendorong partisipasi masyarakat dalam diskusi publik, meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan bahwa suara-suara yang beragam dapat didengar dan dihormati. Selain itu, reformasi yang diarahkan pada perlindungan kebebasan berpendapat juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas internasional sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia dan mendukung demokrasi digital. Dengan regulasi yang inklusif dan berpihak pada masyarakat, pemerintah dapat menciptakan

ekosistem digital yang tidak hanya kondusif bagi diskusi politik, tetapi juga mendorong inovasi, pendidikan, dan pengembangan masyarakat sipil. Dalam proses reformasi, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, masyarakat sipil, dan pengguna teknologi. Pendekatan ini akan memastikan bahwa revisi UU ITE tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, reformasi UU ITE tidak hanya menjadi solusi atas tantangan saat ini, tetapi juga menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi dinamika demokrasi digital di masa depan (Nurfadilla & Nurdin, 2024).

Beberapa negara telah menghadapi tantangan serupa dan berhasil mengatasinya melalui pendekatan yang inklusif terhadap kebebasan berpendapat. Misalnya, Jerman telah menerapkan *Network Enforcement Act* (NetzDG), yang mengatur konten ilegal di media sosial, tetapi tetap memastikan bahwa kebebasan berekspresi dilindungi. Regulasi ini secara tegas membedakan antara ujaran kebencian atau konten ilegal dengan kritik yang sah terhadap pemerintah atau pihak lain. Kanada juga memiliki pendekatan serupa melalui *Charter of Rights and Freedoms*, yang menjamin kebebasan berpendapat, namun tetap memberikan batasan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian. Sementara itu, Norwegia telah mengintegrasikan perlindungan kebebasan berpendapat ke dalam sistem hukum dan kebijakan digitalnya, dengan fokus pada edukasi literasi digital dan mendorong partisipasi masyarakat dalam diskusi publik secara sehat. Negara-negara ini menunjukkan bahwa regulasi yang inklusif dan berpihak pada prinsip-prinsip demokrasi tidak hanya mampu mengatasi tantangan di era digital, tetapi juga menciptakan ruang yang lebih aman dan terbuka bagi kebebasan berekspresi. Pendekatan seperti ini dapat menjadi inspirasi dalam

reformasi UU ITE di Indonesia untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif dan demokratis.

Selain mencontoh negara yang berhasil dalam menghadapi tantangan yang ada, penting untuk mendorong dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi untuk mencari solusi yang mendukung kebebasan berpendapat sambil tetap menjaga ketertiban di ruang siber. Upaya ini harus melibatkan revisi undang-undang yang mencakup definisi yang jelas dan pengaturan yang adil untuk melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, diharapkan ruang siber dapat menjadi wadah yang mendukung demokrasi yang sehat di Indonesia (Jati, 2016).

2. Implikasi Yuridis dari Penerapan UU ITE terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pemilu.

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Sebagai regulasi yang mengatur aktivitas di ruang siber, UU ITE tidak hanya mempengaruhi cara informasi disebarkan tetapi juga dapat membentuk pola partisipasi politik masyarakat. Untuk memahami implikasi ini, penting untuk menggali aspek hukum dan politik yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, serta melihat contoh konkret dari penerapan UU ITE dalam konteks pemilu.

Salah satu implikasi yuridis utama dari UU ITE adalah terbentuknya iklim ketidakpastian hukum yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Ambil contoh dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat pasal bermasalah yakni Pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi

warga sipil, Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik, hingga ketentuan pidana dalam Pasal 45, 45A, dan 45B.

Contohnya Pasal 27A mengatur bahwa "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik." Sementara itu, Pasal 27B terdiri dari dua ayat yang mengatur tindakan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik melalui ancaman kekerasan maupun ancaman pencemaran nama baik. Pasal ini mencakup tindakan memaksa seseorang untuk memberikan barang, utang, atau menghapuskan piutang.

Kedua pasal baru ini tetap memicu kontroversi di masyarakat karena dinilai berpotensi menciptakan polemik baru. Dalam Pasal 45 revisi UU ITE, pelanggaran terhadap Pasal 27A diancam pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp400 juta. Sementara itu, pelanggaran Pasal 27B dikenakan hukuman lebih berat, yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Selain itu, pelanggaran Pasal 28, yang terkait dengan penyebaran berita bohong, juga diatur dengan ancaman pidana hingga 5 bulan penjara dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Revisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berupaya merespons kritik, beberapa ketentuan baru tetap memunculkan tantangan dalam penerapan hukum di era digital. Ini dapat menciptakan kekhawatiran di kalangan individu dan kelompok yang berusaha menyampaikan pendapat mereka. Misalnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah atau calon pemimpin dapat dengan mudah dianggap sebagai pelanggaran hukum, yang kemudian berujung pada tindakan hukum. Kasus Buni Yani, yang dikenakan pasal

penyebaran informasi menyesatkan, mencerminkan bagaimana UU ITE dapat digunakan untuk menekan kritik politik (Mubarok & Jihad, 2024). Dalam konteks ini, masyarakat mungkin lebih memilih untuk tetap diam daripada mengambil risiko menghadapi konsekuensi hukum, sehingga mengurangi tingkat partisipasi dalam diskusi politik.

Teori partisipasi politik menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik adalah elemen yang sangat penting untuk menjamin legitimasi dan akuntabilitas pemerintah. Partisipasi ini mencerminkan keterlibatan warga negara dalam berbagai aktivitas yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan ini, partisipasi politik bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban setiap individu dalam masyarakat demokratis untuk memastikan bahwa suara mereka berkontribusi terhadap arah kebijakan publik dan pengelolaan negara. Menurut Van Deth, partisipasi politik memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada aktivitas tradisional seperti pemungutan suara dalam pemilihan umum. Partisipasi politik juga mencakup berbagai bentuk ekspresi politik lainnya, termasuk menyampaikan pendapat di ruang publik, bergabung dalam demonstrasi, menandatangani petisi, atau bahkan menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyuarakan pandangan politik. Media sosial, khususnya, telah menjadi salah satu alat utama dalam partisipasi politik modern, memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan memobilisasi dukungan secara cepat dan luas. Penyampaian pendapat di ruang publik dan media sosial memainkan peran penting dalam memperkaya diskursus politik. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang sedang atau akan diambil oleh pemerintah, mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik, serta

mengajukan alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Partisipasi semacam ini membantu menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, di mana berbagai perspektif dapat dipertimbangkan sebelum kebijakan diimplementasikan. Namun, untuk memastikan efektivitas partisipasi politik, lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi harus tersedia. Ruang publik dan media sosial perlu dijaga sebagai wadah yang aman untuk menyampaikan pendapat tanpa ancaman pembalasan atau tindakan hukum yang tidak adil. Ketika masyarakat merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan dilindungi, mereka lebih cenderung untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah. Sebaliknya, jika partisipasi politik masyarakat terhambat oleh pembatasan kebebasan berpendapat, seperti ancaman sanksi hukum terhadap kritik yang sah, kepercayaan terhadap sistem politik dapat melemah. Masyarakat mungkin merasa bahwa suara mereka tidak berarti, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat partisipasi dalam pemilu maupun aktivitas politik lainnya. Hal ini berdampak negatif terhadap legitimasi pemerintah, karena hasil kebijakan dianggap kurang mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan (Ziblatt, 2019).

Penerapan UU ITE yang cenderung represif memiliki dampak signifikan terhadap motivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi, terutama ketika digunakan secara berlebihan atau tidak proporsional, dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi partisipasi publik. Ketika individu merasa takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik, baik melalui media sosial maupun forum publik lainnya, ruang untuk diskusi dan debat yang sehat menjadi terbatas. Hal ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi yang bergantung pada keterlibatan aktif warga negara. Riset menunjukkan

bahwa di negara-negara dengan regulasi yang ketat terhadap kebebasan berekspresi, tingkat partisipasi politik masyarakat cenderung lebih rendah. Ketakutan terhadap sanksi hukum atau tindakan represif lainnya sering kali membuat masyarakat enggan untuk terlibat dalam aktivitas politik, seperti menyuarakan opini, mendukung calon tertentu, atau berpartisipasi dalam gerakan sosial. Ketidakaktifan ini menciptakan kesenjangan dalam proses demokrasi, di mana suara-suara kritis atau alternatif yang seharusnya memperkaya diskursus politik menjadi terpinggirkan. Selain itu, penerapan regulasi yang represif dapat menimbulkan dampak psikologis yang lebih luas. Ketika masyarakat merasa bahwa hak mereka untuk berpendapat dibatasi, mereka cenderung menjadi apatis terhadap sistem politik. Apatisme ini dapat berujung pada menurunnya partisipasi dalam pemilu, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan kegiatan politik lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengurangi legitimasi pemerintah karena kebijakan yang dihasilkan dianggap tidak mencerminkan kehendak masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, negara-negara yang mengadopsi pendekatan lebih inklusif terhadap kebebasan berekspresi menunjukkan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Regulasi yang melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik pemerintah secara konstruktif menciptakan lingkungan yang mendorong keterlibatan publik. Partisipasi yang aktif ini tidak hanya memperkuat kualitas demokrasi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan legitimasi kebijakan publik (Manan, 2012).

Di sisi lain, UU ITE juga memberikan landasan hukum untuk menindak pelanggaran di ruang siber, termasuk penyebaran informasi yang dapat menyesatkan dan kebencian berbasis SARA. Meskipun tujuan ini bisa dipahami dalam konteks menjaga ketertiban, penerapan UU ITE yang

berlebihan sering kali mengarah pada penegakan hukum yang diskriminatif. Misalnya, kasus Jerinx, yang ditangkap karena kritiknya terhadap pemerintah selama pandemi COVID-19, menunjukkan bagaimana UU ITE dapat digunakan untuk membungkam suara kritik yang seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi (R et al., 2019). Ini menimbulkan pertanyaan etis tentang batasan kebebasan berpendapat dan bagaimana hal ini berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Salah satu teori penting yang relevan dalam konteks ini adalah teori pengawasan sosial, yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan pemerintah merupakan elemen vital dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam sistem demokrasi. Teori ini berargumen bahwa masyarakat memiliki peran sebagai pengawas (*watchdog*) yang memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Partisipasi ini biasanya diwujudkan melalui kritik, penyampaian opini, diskusi terbuka, dan penyebaran informasi yang relevan bagi kebijakan publik.

Namun, keberadaan regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat, seperti yang sering dikritik dalam penerapan UU ITE, dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan sosial ini. Penelitian yang dilakukan oleh Ritchie menunjukkan bahwa individu cenderung menghindari menyampaikan kritik atau informasi yang dapat mempengaruhi opini publik ketika mereka merasa terancam oleh kemungkinan tindakan hukum. Ancaman ini menciptakan efek jera (*chilling effect*), di mana masyarakat lebih memilih untuk diam daripada mengambil risiko menghadapi konsekuensi hukum, meskipun informasi atau kritik yang mereka sampaikan mungkin valid dan penting untuk diketahui publik. Pengurangan pengawasan sosial ini memiliki dampak serius terhadap

kualitas demokrasi. Ketika masyarakat tidak lagi berani mengkritik atau mempertanyakan kebijakan pemerintah, ruang diskusi publik yang sehat menjadi tertutup. Akibatnya, pemerintah cenderung kurang mendapat tekanan untuk bertindak secara transparan dan akuntabel. Kondisi ini dapat mendorong praktik-praktik yang tidak etis, penyalahgunaan kekuasaan, atau pengambilan kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Selain itu, ketika pengawasan sosial berkurang, kualitas kebijakan publik juga dapat menurun. Kritik dan masukan dari masyarakat merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah melalui pertimbangan yang matang dan mencerminkan beragam perspektif. Tanpa pengawasan tersebut, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat sepihak dan berpotensi tidak efektif dalam menjawab permasalahan yang ada. Untuk mencegah dampak negatif ini, penting bagi regulasi seperti UU ITE untuk dirancang dan diterapkan dengan hati-hati, sehingga tidak membatasi kebebasan berpendapat yang sah. Sebaliknya, regulasi harus mendukung kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, di mana kritik dan pengawasan sosial dapat berlangsung tanpa rasa takut akan intimidasi atau tindakan hukum yang tidak adil. Dengan demikian, teori pengawasan sosial menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara regulasi hukum dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat sebagai bagian dari partisipasi politik yang sehat dalam demokrasi (Junaedi, 2020). Ini menjadi masalah serius dalam konteks pemilu, di mana pengawasan masyarakat terhadap calon pemimpin dan kebijakan sangat penting untuk memastikan pemilu yang bebas dan adil.

Lebih jauh, penerapan UU ITE yang cenderung represif dapat memperburuk ketidakadilan dalam akses informasi, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas demokrasi. Dalam beberapa kasus, individu atau

kelompok yang memiliki akses lebih baik ke media dan sumber daya informasi sering kali lebih mudah untuk menyampaikan pendapat mereka secara luas. Mereka mampu memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial dan platform komunikasi lainnya, untuk memengaruhi opini publik atau memperjuangkan kepentingan tertentu. Sebaliknya, kelompok marginal atau individu dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya informasi sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan pendapat mereka. Ketakutan terhadap jeratan hukum UU ITE, ditambah dengan minimnya akses teknologi, mempersempit peluang mereka untuk berpartisipasi dalam diskursus politik. Akibatnya, suara mereka menjadi terpinggirkan, meskipun mereka mungkin memiliki pandangan atau pengalaman yang relevan untuk memperkaya diskusi publik. Kondisi ini menciptakan tantangan serius bagi demokrasi yang inklusif. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah kesetaraan dalam partisipasi politik, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Ketika kelompok-kelompok tertentu terpinggirkan, demokrasi menjadi kurang representatif dan berisiko didominasi oleh suara-suara yang lebih kuat secara ekonomi atau politik. Ketidakadilan ini juga dapat memperlebar kesenjangan sosial dan politik dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang sudah memiliki kekuatan dan akses yang lebih besar cenderung memperkuat posisi mereka, sementara kelompok marginal semakin kehilangan peluang untuk memengaruhi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menciptakan ketidakpuasan sosial dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi (Labolo & Ilham, 2015). Ketidaksetaraan ini dapat terlihat dalam pemilu, di mana kelompok-

kelompok tertentu mungkin tidak mendapatkan eksposur yang cukup untuk menyampaikan pandangan mereka, sementara pihak lain dapat menggunakan UU ITE untuk mengontrol narasi.

Kasus lain yang patut dicontohkan adalah penangkapan sejumlah aktivis dan jurnalis yang berusaha menyampaikan kritik terhadap pemerintah menjelang pemilu. Hal ini tidak hanya menciptakan iklim ketakutan tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Sebagai contoh, beberapa jurnalis yang meliput kampanye pemilu dan mengkritik calon tertentu menghadapi ancaman hukum berdasarkan UU ITE, yang menyebabkan mereka memilih untuk membatasi laporan mereka (Husna et al., 2021). Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan UU ITE dapat menimbulkan efek chill, di mana individu merasa tidak bebas untuk berpartisipasi dalam diskusi politik.

Dari perspektif internasional, berbagai negara telah menunjukkan cara yang lebih efektif dalam mengatur kebebasan berpendapat di ruang siber tanpa mengorbankan partisipasi masyarakat. Negara-negara Skandinavia, misalnya, memiliki kerangka hukum yang melindungi kebebasan berekspresi sambil tetap memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Di Indonesia, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi UU ITE agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan aman dan tanpa rasa takut (Prasetyo, 2017).

Dalam konteks ini, penting bagi para pemangku kepentingan untuk berdialog dan menciptakan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Reformasi UU ITE harus mengutamakan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, agar masyarakat merasa lebih nyaman dalam berpartisipasi dalam proses politik. Ini termasuk memastikan bahwa

penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, serta memberikan perlindungan bagi mereka yang menyuarakan pendapat mereka (Witianti, 2016). Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pemilu dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan diakui.

Penerapan UU ITE secara jelas memiliki implikasi yuridis yang kompleks terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Pada satu sisi, tujuan dasar dari UU ITE, seperti menjaga ketertiban, keamanan informasi, dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi, merupakan langkah penting dalam era digital. Namun, di sisi lain, penerapan yang cenderung represif dan multitafsir telah menimbulkan berbagai masalah, khususnya dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan partisipasi politik. Regulasi yang ketat sering kali menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, terutama kritik terhadap pemerintah atau calon tertentu. Efek jera (*chilling effect*) yang dihasilkan dari ancaman tindakan hukum dapat menghambat diskusi politik yang sehat dan terbuka, yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama demokrasi. Ketika masyarakat merasa takut untuk berpartisipasi secara aktif, ruang demokrasi menjadi terbatas, dan proses pemilu kehilangan dimensi partisipatif yang seharusnya melibatkan semua lapisan masyarakat. Selain itu, regulasi yang represif berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan penggunaan ruang siber. Kelompok-kelompok tertentu yang memiliki sumber daya lebih baik sering kali mampu memanfaatkan teknologi untuk memengaruhi opini publik, sementara kelompok marginal atau individu dengan keterbatasan akses sering kali terpinggirkan. Hal ini tidak hanya mengurangi inklusivitas, tetapi juga dapat memperlemah legitimasi hasil pemilu karena tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam mengatur ruang siber. Pendekatan ini harus memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya melindungi dari penyalahgunaan informasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk bebas berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa rasa takut atau diskriminasi. Reformasi UU ITE menjadi langkah penting untuk memperjelas rumusan pasal-pasal yang multitafsir dan memastikan bahwa penerapannya selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kedepan pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan penyelenggara pemilu, dalam proses perumusan kebijakan terkait ruang siber. Hal ini akan membantu menciptakan regulasi yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, ruang siber dapat menjadi medium yang mendukung partisipasi masyarakat secara luas, sehingga memperkuat proses demokrasi dalam konteks pemilu dan seterusnya.

IV. KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami beberapa kali revisi, termasuk perubahan kedua dalam UU Nomor 1 Tahun 2024, memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam ruang siber, khususnya dalam konteks pemilu. Meskipun bertujuan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi, implementasi UU ITE cenderung multitafsir dan represif, yang berpotensi menghambat kebebasan berpendapat dan mengurangi partisipasi politik. Pasal-pasal seperti Pasal 27A

dan Pasal 27B, meskipun dirancang untuk menggantikan pasal yang sebelumnya dianggap "pasal karet," tetap menimbulkan kontroversi. Ketidakjelasan definisi hukum dalam beberapa ketentuan menciptakan ketidakpastian yang dapat disalahgunakan untuk menekan suara kritis. Kondisi ini menciptakan efek jera (*chilling effect*), yang membuat masyarakat enggan untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka, baik dalam ruang publik maupun digital. Hal ini pada akhirnya melemahkan proses demokrasi dengan mengurangi ruang diskusi politik yang sehat dan inklusif. Selain itu, penerapan UU ITE yang tidak proporsional berisiko memperbesar kesenjangan dalam akses informasi. Kelompok yang memiliki akses lebih besar ke teknologi dan sumber daya lebih mampu memanfaatkan ruang siber untuk mendukung narasi mereka, sementara kelompok marginal sering kali terpinggirkan. Akibatnya, demokrasi yang ideal di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik menjadi sulit terwujud.

SARAN

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari penerapan UU ITE, diperlukan reformasi yang mendalam dengan pendekatan yang berbasis prinsip demokrasi. Pemerintah perlu merevisi pasal-pasal multitafsir seperti Pasal 27A dan Pasal 27B untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan kebebasan berpendapat tetap terlindungi. Selain itu, proses legislasi harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah, guna menghasilkan regulasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penting pula untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban dalam

ruang siber, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif tanpa melanggar hukum. Indonesia juga dapat belajar dari praktik internasional, seperti di Jerman, Kanada, dan Norwegia, yang berhasil mengatur ruang digital dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penegakan hukum. Dengan pendekatan yang tepat, UU ITE dapat menjadi instrumen yang mendukung partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital, alih-alih menjadi penghalang yang merugikan hak-hak dasar warga negara.

BIBLIOGRAFI

- Ahsan, F., Andrianto, W., Achmad Andaru, D. D., & Hanapi, M. M. (2023). The Postponed Regional Head Elections in Emergency Situations: A Constitutional Democracy Perspective in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 12(2), 202. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.64638>
- Andersen, I., & Andersen, I. V. (2022). "Well, That's Just My Opinion": The Principle of Expression and the Public Debate. *Journal of Deliberative Democracy*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.16997/10.16997/JDD.958>
- Andi Fadilah, R. A. dan S. R. P. (2021). *Eksistensi Keamanan Siber Terhadap Tindakan Cyberstalking Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cybercrime*. 6(4), 6.
- Armiwulan, H., Rahman, R. A., Prabowo, V. N., & Hajdã°, J. (2024). Artificial Intelligence and Its Challenges To Elections In Indonesia: A Legal Analysis. *Jambura Law Review*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24243>
- Budhijanto, D. (2024). *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Revisi UU ITE 2024 Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisia)* (T. Risa (ed.); 1st ed.). Riefika Aditama.
- Budiman, A. A., Maya, G. A. K. S., Rahmawati, M., & Abidin, Z. (2021). Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia. In *Metode Penelitian* (Vol. 12, Issue 1).
- Bukhroni, F. L. W., & Aisyah, V. N. (2020). Framing Kasus Ujaran Kebencian di

- Televisi. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 80–96.
<https://doi.org/10.24815/jkg.v9i1.15990>
- Choiriyati, W., & Windarsih, A. (2019). Media Ethics In New Technology Culture (Reviewing The Internet Ethics Versus The Information And Electronic Transaction Act). *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 21(2).
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Fatimah, S., Wiwoho, J., & Isharyanto, I. (2024). Global Perspectives on Freedom of Expression in Environmental Governance: Legal Implications and Challenges. *Jambe Law Journal*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/home.v7i2.456>
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51.
<https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>
- Fernando, Z. J., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The Freedom of Expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 1–11.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Firmansyah, D. (2023). *Analisis Efektivitas Penerapan Pasal Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Kaum Wanita*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Fitriani, D., Budiyani, Y., Hardika, A. R., & Mita Choerunissa. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 362–371.
- Gustrinanda, R., & Tanjung, T. (2023). Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu di Indonesia. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 158–163.

- Heinze, E. (2016). *Hate Speech and Democratic Citizenship* (pp. 1–216). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198759027.001.0001>
- Husna, A. N., Zahra, A. A., Rosyidi, M. I., Qomariyah, L., Kurniaty, Y., Purbaya, M. E., Afgani, F. A., Perdana, A. I., Triaji, A., & Romadlon, F. (2021). *Memberdayakan Masyarakat Digital*. Unimma Press.
- Isdyanto, H., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2021). Advantages and Disadvantages of Implementing the Electronic Information and Transactions Law on Freedom of Speech. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia*, 1–7. <https://doi.org/10.4108/EAI.29-6-2021.2312615>
- Jati, W. R. (2016). Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online dalam Politik Kelas Menengah di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(1), 25–35. <https://doi.org/10.22146/JPS.V3I1.23524>
- Joenaidy Efendi, F. F. L. (2023). *Aspek Hukum Media Sosial Perdata dan Pidana* (1st ed.).
- Junaedi, F. (2020). *Dinamika komunikasi di masa pandemi COVID-19*. Laboratorium Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Khairul Fahmi, B. K. A. (2021). *Kampanye Pemilu di Media Sosial (Pengaturan, Penggunaan, Pengawasan Media Sosial Dalam Pemilu 2019)* (I. Vidyafi (ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Khairunnisa, Arbaiyah, Sulung Tangguh Yurizon, S. D. E. (2024). Analisis Penyebab Mahasiswa Tidak memilih Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Jambi Luar Kabupten Muoro Jambi J. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 728–737.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: teori, konsep, dan isu strategis*. PT. RajaGrafindo, Divisi Buku Perguruan Tinggi.

- Laniuk, Y. (2019). Freedom As a Foundation of Liberal Democracy: a Normative Perspective. *Visnyk of the Lviv University Series Philosophical Sciences*, 23(23), 35–46. <https://doi.org/10.30970/2078-6999-2019-23-5>
- Manan, B. (2012). *Politik publik pers*. Dewan Pers.
- Mandarlangi, M. A., Kurnia, I., & Alamsyah, M. N. (2024). Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(3), 548–560.
- Mubarok, Z., & Jihad, K. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hate Speech Pada Masa Pemilu di Indonesia. *Smart Law Journal*, 3(1), 12–24.
- Munawaroh, S., & Suseno, A. (2024). *Keluh Kesah Online Sebagai Media Ekspresi Di Era Digital (Studi Etnografi Virtual dalam Grup Facebook KBLB V3)*. 4, 3051–3060.
- Naibaho, L., Andriani, J., Hutapea, N. M., Lumban, S., Br, D. Y., Rachman, F., Sosial, M., & Pkn, P. (2024). *Hoaks Di Era Media Sosial Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siswa / I Sma Swasta Eria Medan*. 7, 15269–15277.
- Ngazis, M., Raya, J., Km, K., Kulon, T., & Tengah, J. (2024). *Tantangan Hukum Terkait Regulasi Kampanye di Medsos Dalam Pemilu 2024*. 180–193.
- Nur Fadilla, A., Safitri Agustina, R., & Aulia Syafikarani, F. (2024). Dinamika Perubahan Sosial dan Politik di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 17–23.
- Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 44–49.
- Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2022). Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law. *Jambe Law*

Journal, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>

Nyoman Gede Antaguna, & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kertha Wicaksana*, 17(2), 138–146. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>

Prasetyo, T. (2017). *Pemilu bermartabat: reorientasi pemikiran baru tentang demokrasi*. PT RajaGrafindo Persada.

Putra, Y. S., Pujiyono, P., Rochaeti, N., & Fernando, Z. J. (2024). EIT Law at the Crossroads: Exploring Legal Dilemmas, Freedom of Expression, and Human Rights. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(3), 1315–1332. <https://doi.org/10.62271/PJC.16.3.1315.1332>

R, R. F. A., Siswanto, H., Nainggolan, I. L., Susanto, M., Satrio, N., Zainab, N., Rahayu, P., Saputra, R., & Dhianty, R. (2019). *Politik Hukum Era Jokowi*. Puskapkom.

Rachmawati, F. A., Nasya, J., & Taduri, A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 491–508.

Rohmah, E. I. (2023). Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(1), 28–56.

Simamora, D. F., Fadilah, A. N., Nainggolan, M. C., Siregar, A. R. C., Ramdani, N., Silaban, R. S., & Hadiningrum, S. (2023). Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Capitalis: Journal Of Social Sciences*, 1(1), 4287–4288.

Suhariyanto, D., Ishwara, A. S. S., & Kirana, S. D. (2024). Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia: A Substantive Justice

- Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(2), Article 2.
<https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1441>
- Syahri, S. A. (2010). Kebebasan Berpendapat melalui Media Baru dalam Bayang-bayang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Cakrawala-Jurnal Humaniora* ., 10(1), 26–31.
- Tan, K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 14–29. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376>
- Utin Indah Permata Sari. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*, 2(01), 58–77. <https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7>
- Witianti, S. (2016). Demokrasi dan Pembangunan. *Jurnal Wacana Politik*, 1(1), 71–76.
- Xiang, R. (2024). Enhancing Democratic Governance: The Crucial Role of Broad Public Participation in Government Public Consultations. *International Journal of Education and Humanities*, 13(3), 254–256. <https://doi.org/10.54097/P8AQY810>
- Yurizal. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Cyber Crime* (G. Sorja (ed.); 1st ed.). MNC Publishing.
- Ziblatt, S. L. D. (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhdi, A., Suparman, E., Perwira, I., & Nguindip, N. C. (2025). Presidential Partisanship in Indonesian Elections: A Legal and Ethical Analysis. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(1), Article 1.
<https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1635>